

PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN DI INDONESIA

Hj. Nurul Azizah*

Abstract: *The role of religious education in actualizing justice and peace in Indonesia has been going on for a long time, along with the advent of Islam in Indonesia. However, it does not mean the role is completely finished. It is widely asserted that there were still anarchic action, injustice, intolerance and other destructive actions happened. In this void, the study on the role of religious education in actualizing justice and peace is interesting to do. This research was aimed at seeking the new light on Islamic education that could be used as standards for the development of religious education in efforts to achieve peace in Indonesian. This study used a qualitative approach by employing in-depth interviews, participation observation, and documentation as data collection methods. The results of this study revealed that firstly, religion has a fundamental role in the existence and continuity of Indonesian. Secondly, in the era of regional autonomy and reformation, it was found that there was any significant improvement of the quality of religious education in which it was implemented consistently. Thirdly, in post-reformation, religious education took essential role as a place to build moral values of human resources to realize a sense of justice and peace in Indonesia.*

ملخص: كان دور التربية الدينية في تحقيق العدالة والسلام في إندونيسيا منذ زمان بعيد خلال دخول الإسلام في إندونيسيا. ورغم ذلك فإن هذا الدور لا يتوقف إلى هذا الحد. وذلك بنشوء ظاهرة العنف، وعدم المبالاة بالعدالة، وعدم التسامح، والأنشطة المتوجهة إلى عملية الإفساد والتدمير. ولا تزال الدراسة في دور التربية الإسلامية في تحقيق العدالة والسلام شيقة للقيام بها. أجريت هذه الدراسة لاعطاء الضوء الجديد في التربية الدينية وخاصة التربية الإسلامية، ويمكن أن تكون هي معيارا لتنمية التربية الدينية لتحقيق السلام في إندونيسيا. ونوع هذه الدراسة دراسة وصفية، وأسلوب جمع بياناتها عن طريق المقابلة العميقة، والملاحظة المشتركة، والوثائق المكتوبة. أتى البحث بالنتائج التالية : (١) للدين دور فعّال في وجود واستمرارية الشعب الإندونيسي، (٢) وفي عصر استقلالية المنطقة والإصلاح إن واقع التربية الدينية ترفت جودتها باستمرار، (٣) وبعد العصر الإصلاحي، أصبحت التربية الدينية موضع تنمية الأخلاق الكريمة والموارد البشرية المتقنية حتى تحققت العدالة والسلام في إندونيسيا.

Keywords: *Pendidikan agama, keadilan, perdamaian di Indonesia*

* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan di Era Reformasi peranan pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi umat Islam. Dalam Islam, Agama di kenal dengan sebutan *Ad-diin*.¹ Agama merupakan peraturan yang di jadikan pedoman hidup yang akan menuntun kearah yang benar. Pendidikan agama Islam merupakan dasar yang harus diperkenalkan sejak dini. Jika pendidikan agama di berikan secara baik dan benar kepada seseorang, maka tidak perlu di khawatirkan, karena setidaknya agama adalah pondasi dasar dari kehidupan. Dengan bekal pendidikan agama Islam, kehidupan manusia akan lebih terarah dan teratur.²

Pendidikan merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong terjadinya perubahan baik dalam pengetahuan maupun untuk perbaikan ekonomi keluarga. Selama ini pendidikan dijadikan sebagai sarana pembelajar bagi berbagai kalangan, tanpa memandang agama, etnis, tingkat ekonomi maupun kedalaman pengetahuan. Sekolah dijadikan sebagai laboratorium untuk berbagai kalangan berinteraksi saling kenal satu sama lain dan sharing pengalaman hidup tanpa melihat adanya perbedaan. Peserta didik bisa saling mengenal budaya, agama, bahkan gaya dan selera dari berbagai kelas sosial masyarakat tanpa ada sekat. Pendidikan berjalan tanpa pembedaan sekat golongan sehingga ada proses pembelajaran untuk saling kenal dan bersimpati antar peserta didik. Sekolah (negeri) sering dijadikan potret keberagaman peserta didik.

Sekolah homogen ditandai dengan kesamaan karakteristik peserta didik, entah karena persamaan ekonomi, golongan, agama maupun etnisitas. Kecenderungan ini tampaknya semakin marak dengan tumbuhnya sekolah-sekolah elit, berlabel internasional, unggul dalam hal sarana dan prasarana yang tumbuh subur di kota-kota besar, yang uniknya makin digemari masyarakat urban. Sekolah-sekolah tersebut hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas dan tidak memungkinkan bagi golongan ekonomi bawah. Hal yang sama juga muncul disekolah-sekolah berbasis keagamaan.

Program pemerataan hasil pembangunan yang diharapkan dapat mencakup seluruh masyarakat, pada kenyataannya justru dinikmati oleh golongan mampu, terutama elit atau kelas menengah yang dekat dengan penguasa. Diperkirakan

¹ *Ad-diin* yaitu istilah yang berasal dari bahasa Arab. Secara terminology kata Agama diambil dari bahasa Sanskerta, sebagai pecahan dari kata A artinya "tidak" dan gama artinya "kacau" jadi agama berarti "tidak kacau"

² Rois Mahfud, *Al Islam: Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Penerbit Airlangga), 35.

hanya sekitar 20 % golongan masyarakat menengah bawah yang dapat menikmati hasil pembangunan.³

Kondisi ini memunculkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar. Akumulasi modal terjadi tetapi hanya pada segelintir orang. Kemudahan akses kerja sama dinikmati pengusaha besar, berbagai bidang usaha mereka kuasai sedangkan masyarakat miskin masih dililit kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas manusia terhambat dan mengganggu pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan selain mempengaruhi berbagai variabel sosial juga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Survey dari beberapa negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan efisiensi produksi pertanian. Pada masyarakat yang berpendidikan ada peningkatan efisiensi produksi sebesar 7% dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.⁴ Peningkatan pendidikan juga mempermudah akses dalam mencari pekerjaan.

Pendidikan menjadi tujuan hampir untuk semua keluarga di Indonesia. Pendidikan menjadi escalator sosial dimana melalui pendidikan status sosial seseorang mampu dikontrol menuju status yang diharapkan. Pentingnya pendidikan membuat hampir semua orang mengalokasikan semua sumber dayanya untuk menyekolahkan penerus/generasi muda dengan menjejali mereka dengan pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan tersebut juga dibarengi dengan semakin banyaknya penyedia pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri (via lisensi) yang menawarkan program pendidikan unggulan mulai dari pre-school (PAUD) hingga perguruan tinggi. Masing-masing lembaga tersebut menawarkan sarana dan prasarana belajar yang lengkap, guru yang kompeten dan lingkungan pembelajaran yang nyaman plus lingkungan sosial (pertemanan) yang seimbang. Seimbang disini mereka menawarkan gaya hidup, level status sosial yang sama dan berimbang antar siswa (homogen).

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan tersebut juga menawarkan pendidikan yang berbasis pada etnis atau agama tertentu untuk menyasar orang tua yang idealismenya masih kuat terutama yang ingin anaknya tumbuh sejak kecil dengan metode belajar yang berkualitas plus ada didikan agama eksklusif yang orang tua inginkan.

Hampir sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan tersebut (sekolah) menarik kontribusi yang cukup besar (mahal) untuk fasilitas dan kualitas yang mereka tawarkan. Pada akhirnya kesan eksklusif menjadi lekat dengan dunia

³ Tadjuddin Effendi, *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000). 56.

⁴ Ibid.

pendidikan. Siswa yang berasal dari golongan ekonomi mapan bisa memilih dimana mereka akan sekolah, sebaliknya siswa dari golongan menengah bawah pada akhirnya tidak akan punya pilihan. Inilah yang memunculkan gejala eksklusifitas pendidikan karena tidak semua anak/siswa dapat bermain, belajar bersama tanpa ada sekat status sosial, etnis, ras, maupun agama. Akhirnya eksklusifitas justru akan melahirkan diskriminasi.

Gejala kemunculan sekolah eksklusif di berbagai wilayah telah tampak. Fenomena ini menarik untuk dilihat bukan dalam kapasitas untuk mempertanyakan kualitas sekolah-sekolah tersebut tetapi lebih melihat pada akibat jangka panjangnya pada perkembangan siswa dan kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung akan memagari siswa-siswa ini perspektif yang diajarkan di kelas dan tidak bisa melihat perspektif yang berbeda, sehingga ada kemungkinan akan melahirkan konflik, pertentangan, gesekan karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen.

Homogenisasi pendidikan kemudian diartikan sebagai keseragaman, harmonisasi yang 'dipaksakan', kesamaan, kesebandingan, sesuatu hal yang memang dibuat sama dan seragam dalam dunia pendidikan, termasuk didalamnya kesamaan, keberimbangan status sosial siswa dan orang tuanya, kesamaan agama siswanya hingga kesamaan etnis siswanya. Kesemuanya tersebut mewujud dalam sekolah-sekolah yang berbasis pada status (prestise)/education francise, dan sekolah berbasis agama, baik tingkat dasar maupun tingkat atas. Homogenisasi disini sama artinya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda status sosial, agama atau etnis. Pada akhirnya sekolah yang homogen menjadi sama dengan sekolah eksklusif. Gejala homogenisasi inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi dunia pendidikan Indonesia.

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA REFORMASI

Peranan pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi umat Islam. Dalam Islam, Agama di kenal dengan sebutan *Ad-diin*.⁵ Ditengah arus perkembangan zaman seperti sekarang ini, peran pendidikan agama Islam, masih saja ada yang beranggapan bahwa ketinggalan zaman karena menganggap pendidikan agama di pondok pesantren masih menganut sistem tradisional yang konservatif, di anggap tidak modern. Padahal kalau di telusuri, sudah banyak pondok pesantren yang menerapkan sistem pendidikan dan pengajaran modern dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan

⁵ *Ad-diin* yaitu istilah yang berasal dari bahasa Arab. Secara terminology kata Agama diambil dari bahasa Sanskerta, sebagai pecahan dari kata A artinya "tidak" dan gama artinya "kacau" jadi agama berarti "tidak kacau"

kurikulum yang di tetapkan pemerintah. Bahkan banyak pesantren ditunjang fasilitas teknologi dan informasi yang canggih. Jika pendidikan agama di berikan secara baik dan benar kepada seseorang, maka tidak perlu di khawatirkan, karena setidaknya Agama adalah pondasi dasar dari kehidupan. Dengan bekal pendidikan agama Islam, kehidupan manusia akan lebih terarah dan teratur.⁶

Pendidikan merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong terjadinya perubahan baik dalam pengetahuan maupun untuk perbaikan ekonomi keluarga. Selama ini pendidikan dijadikan sebagai sarana pembelajar bagi berbagai kalangan, tanpa memandang agama, etnis, tingkat ekonomi maupun kedalaman pengetahuan. Sekolah dijadikan sebagai laboratorium untuk berbagai kalangan berinteraksi saling kenal satu sama lain dan sharing pengalaman hidup tanpa melihat adanya perbedaan. Peserta didik bisa saling mengenal budaya, agama, bahkan gaya dan selera dari berbagai kelas sosial masyarakat tanpa ada sekat. Pendidikan berjalan tanpa perbedaan sekat golongan sehingga ada proses pembelajaran untuk saling kenal dan bersimpati antar peserta didik. Sekolah (negeri) sering dijadikan potret keberagaman peserta didik. Hanya saja belakangan ini potret keberagaman ini mulai mengalami kemunduran. Muncul banyak sekolah yang berbasis pada keseragaman (homogen).

Sekolah homogen ditandai dengan kesamaan karakteristik peserta didik, entah karena persamaan ekonomi, golongan, agama maupun etnisitas. Kecenderungan ini tampaknya semakin marak dengan tumbuhnya sekolah-sekolah elit, berlabel internasional, unggul dalam hal sarana dan prasarana yang tumbuh subur di kota-kota besar, yang uniknya makin digemari masyarakat urban. Sekolah-sekolah tersebut hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas dan tidak memungkinkan bagi golongan ekonomi bawah. Hal yang sama juga muncul di sekolah-sekolah berbasis keagamaan.

Peningkatan dan pengembangan manusia (*human development*) salah satu dasarnya adalah dengan pendidikan. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia. Esensi dari pendidikan sendiri diharapkan mampu mencetak manusia yang berkompetensi tinggi, mampu bersaing dan mendayagunakan dirinya untuk kemandirian dan meningkatkan potensi yang terkandung dalam dirinya demi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Dari keseluruhan variabel sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran penting yang mempengaruhi berbagai variabel sumber daya manusia yang lain. Studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh cukup

⁶ Rois Mahfud, *Al Islam: Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta; PT. Penerbit Airlangga, 2011), 80.

signifikan antara kemampuan membaca dengan peningkatan taraf kehidupan.⁷ Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tinggi rendahnya angka kelahiran. Pada masyarakat yang berpendidikan rendah, angka kelahirannya tergolong tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Selain itu pendidikan juga mempengaruhi variabel sosial lain seperti ukuran keluarga, kesehatan, harapan hidup, nutrisi dan kepekaan sosial.

Pendidikan selain mempengaruhi berbagai variabel sosial juga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Survey dari beberapa negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan efisiensi produksi pertanian. Pada masyarakat yang berpendidikan ada peningkatan efisiensi produksi sebesar 7% dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.⁸ Peningkatan pendidikan juga mempermudah akses dalam mencari pekerjaan.

Pendidikan menjadi tujuan hampir untuk semua keluarga di Indonesia. Pendidikan menjadi eskalator sosial dimana melalui pendidikan status sosial seseorang mampu dikontrol menuju status yang diharapkan. Pentingnya pendidikan membuat hampir semua orang mengalokasikan semua sumber dayanya untuk menyekolahkan penerus/generasi muda dengan menjejali mereka dengan pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan tersebut juga dibarengi dengan semakin banyaknya penyedia pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri (via lisensi) yang menawarkan program pendidikan unggulan mulai dari pra-sekolah (PAUD) hingga perguruan tinggi. Masing-masing lembaga tersebut menawarkan sarana dan prasarana belajar yang lengkap, guru yang kompeten dan lingkungan pembelajaran yang nyaman plus lingkungan sosial (pertemanan) yang seimbang. Seimbang disini mereka menawarkan gaya hidup, level status sosial yang sama dan berimbang antar siswa (homogen).

Hampir sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan tersebut (sekolah) menarik kontribusi yang cukup besar (mahal) untuk fasilitas dan kualitas yang mereka tawarkan. Pada akhirnya kesan eksklusif menjadi lekat dengan dunia pendidikan. Siswa yang berasal dari golongan ekonomi mapan bisa memilih dimana mereka akan sekolah, sebaliknya siswa dari golongan menengah bawah pada akhirnya tidak akan punya pilihan. Inilah yang memunculkan gejala eksklusifitas pendidikan karena tidak semua anak/siswa dapat bermain, belajar bersama tanpa ada sekat status sosial, etnis, ras, maupun agama. Akhirnya eksklusifitas justru akan melahirkan diskriminasi.

⁷ Thamarajakshi, R. *Human Resource Development in Asian Countries An Integrated Approach*, 89.

⁸ Ibid.

Gejala kemunculan sekolah eksklusif di berbagai wilayah telah tampak. Fenomena ini menarik untuk dilihat bukan dalam kapasitas untuk mempertanyakan kualitas sekolah-sekolah tersebut tetapi lebih melihat pada akibat jangka panjangnya pada perkembangan siswa dan kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung akan memagari siswa-siswa ini perspektif yang diajarkan di kelas dan tidak bisa melihat perspektif yang berbeda, sehingga ada kemungkinan akan melahirkan konflik, pertentangan, gesekan karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen.

Homogenisasi pendidikan kemudian diartikan sebagai keseragaman, harmonisasi yang 'dipaksakan', kesamaan, kesebandingan, sesuatu hal yang memang dibuat sama dan seragam dalam dunia pendidikan, termasuk didalamnya kesamaan, keberimbangan status sosial siswa dan orang tuanya, kesamaan agama siswanya hingga kesamaan etnis siswanya. Kesemuanya tersebut mewujud dalam sekolah-sekolah yang berbasis pada status (prestise)/education francise, dan sekolah berbasis agama, baik tingkat dasar maupun tingkat atas. Homogenisasi disini sama artinya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda status sosial, agama atau etnis. Pada akhirnya sekolah yang homogen menjadi sama dengan sekolah eksklusif. Gejala homogenisasi inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi dunia pendidikan Indonesia

PERDAMAIAN: WUJUD DARI KEADILAN AGAMA

Keadilan merupakan cikal bakal dari perdamaian. Jika para tokoh agama dan lembaga-lembaga pendidikan agama sendiri ternyata tidak sungguh-sungguh berusaha mewujudkan keadilan, maka sebenarnya mereka juga tidak berhak menuntut keadilan. Kemudian, jika keadilan itu tidak terwujud, maka perdamaian juga akan sulit didapat. Keduanya saling terkait, dua sisi dari sekeping mata uang. Namun manusia rupanya tetap saja tak mau peduli dengan kebenaran yang nyata ini.

Menurut ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*)⁹ sebuah organisasi yang aktif mewujudkan perdamaian melalui agama menyimpulkan, di Indonesia agama belum menjadi media untuk mewujudkan kehidupan damai. Sebaliknya, agama malah menjadi alat pemicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejatinya, agama datang untuk membangun damai di antara manusia. Keyakinan itulah yang menginspirasi para pendiri republik ini menggunakan nilai-nilai agama dengan formulasi yang amat indah, yakni Ketuhanan Yang

⁹ <http://www.icrp-online.org>.

Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, ideologi dan falsafah negara. Tentu harapannya adalah dengan menjadikan nilai-nilai agama yang amat sentral itu sebagai basis dalam pengelolaan kehidupan berbangsa akan terwujud suatu bangsa yang bukan hanya religius, tetapi juga mencintai perdamaian.

Menjadikan agama sebagai media untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia di mana pun merupakan cita-cita luhur umat beragama di seluruh dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Agama harus diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan perdamaian. Karena itu, *religions for peace* (agama untuk perdamaian) menjadi semboyan yang diproklamirkan para pemuka agama di berbagai belahan dunia saat ini.

Meminjam pendapat Musdah mulia¹⁰ bahwa ada banyak definisi tentang perdamaian, namun paling tidak, perdamaian harus menjamin tiga hal: penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat; perlakuan setara terhadap semua manusia tanpa membedakan unsur jenis kelamin, gender, bahasa, warna kulit, suku, ras, agama dan kepercayaan; dan pemenuhan hak asasi manusia tanpa diskriminasi sedikit pun.

Sangat jelas bahwa tidak mungkin ada perdamaian selama masih ada praktek diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap suatu kelompok untuk alasan apa pun, termasuk atas nama agama; tidak ada perdamaian selama masih ada perilaku korupsi, nepotisme dan politik uang; tidak ada perdamaian jika masih ada kemiskinan dan kebutuhan pokok masyarakat belum terpenuhi; tidak ada perdamaian jika masih ada pelanggaran hukum dan kasus hak asasi manusia; tidak ada perdamaian tanpa upaya serius menjaga kelestarian alam.

Mempromosikan agama menurut Musdah sangatlah penting untuk perdamaian, karena, secara normatif semua agama mengajarkan tiga hal utama sebagai basis dalam perwujudan perdamaian, yaitu pentingnya penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat; perlakuan setara terhadap semua manusia tanpa kecuali; dan pemenuhan hak asasi seluruh manusia tanpa diskriminasi sedikit pun. Jadi, secara hakiki agama datang demi mewujudkan perdamaian.

Sangat di sayangkan dalam fakta realitas di negeri ini tidak demikian. Alih-alih jadi sumber damai, agama malah dijadikan alat pemicu konflik dan teror, agama diubah fungsinya sedemikian rupa menjadi komoditi politik dan kehilangan spiritnya sebagai sumber inspirasi damai. Bahkan, sebagian warga telah menjadikan agama sebagai berhala yang disembah. Akibatnya, atas nama agama, institusi agama berani mengeluarkan fatwa yang membuat sekelompok

¹⁰ Ibid.

warga kehilangan haknya untuk beragama secara bebas, bahkan sekelompok warga rela membunuh sesama; atas nama agama, berbagai aksi teror dan bom bunuh diri pun terjadi; atas nama agama, sekelompok warga berani melarang warga lain mendirikan rumah ibadah meski telah lama memiliki izin bangunan; atas nama agama, pemerintahan kota berani mengeluarkan SK yang melawan keputusan MA; atas nama agama, pemerintah daerah berani menerbitkan perda-perda diskriminatif dan inkonstitusional.¹¹

Akibatnya, agama gagal memberi efek konstruktif pada pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jangan heran, jika jumlah dana yang melimpah untuk pembangunan bidang agama sungguh-sungguh tidak efektif dalam meningkatkan kualitas moral dan religiusitas bangsa ini. Maraknya kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, semakin membengkaknya kasus korupsi dan nepotisme, semakin ramai pelaksanaan pilkada yang culas dan sarat dengan politik uang, penyalahgunaan anggaran pembangunan, mafia hukum, tingginya angka kriminalitas, kekerasan, dan berbagai bentuk eksploitasi lingkungan. Semua itu merupakan cerminan masyarakat yang tidak bermoral, masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama.

Diperlukan kerja keras dan upaya serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil (*civil society*), dan terutama para pemuka agama demi menjadikan agama sebagai inspirasi perdamaian. Antara lain, perlu melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, mengubah budaya kekerasan dan intoleran menjadi budaya damai (*culture of peace*), khususnya melalui pendidikan agama dalam arti seluas-luasnya, mulai dari pendidikan agama dalam keluarga. Mengapa perlu reformasi pendidikan agama? Sebab, pendidikan agama selama ini lebih banyak mengajarkan doktrin, ritual dan hal-hal bersifat legal-formalistik sehingga akhirnya lebih banyak melahirkan sikap permusuhan dan kebencian pada orang berbeda. Ini harus segera diakhiri.

Pendidikan agama perlu menggunakan pendekatan multikulturalisme dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip pluralisme. Pendidikan agama hendaknya fokus pada upaya transformasi nilai-nilai moral, nilai-nilai universal kemanusiaan yang merupakan intisari agama, seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, kemaslahatan, kedamaian, kesetaraan, kebebasan dan tanggung jawab. Perlu sekali mengubah budaya masyarakat yang eksklusif, intoleran, culas, dan senang kekerasan menuju budaya inklusif, toleran, jujur, bersih, humanis dan pluralis.

¹¹ Ibid.

Tujuan akhir dari pendidikan agama harus mampu melahirkan manusia yang cinta damai dan berakhlak mulia. Semoga di masa depan pembangunan bidang agama yang menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya itu sungguh dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius dan vokal menyuarakan perdamaian (*vote people of peace*).

Ketidakadilan yang terjadi di berbagai bidang ditengarai menjadi salah satu penyebab mendasar munculnya tindakan yang banyak disebut sebagai terorisme. Oleh karenanya mustahil akan menyelesaikan persoalan terorisme tanpa mewujudkan tatanan kehidupan yang adil.

Persoalan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah budaya konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan karakter para siswa. Maraknya konflik dan kekerasan mendesak bagi sekolah untuk mengembangkan kultur perdamaian. Dalam hal ini, sekolah harus memberi kesempatan kepada semua siswa secara adil dalam lingkungan belajar tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, agama, jender maupun etnis. Melalui keadilan dalam mengakses pendidikan, semua siswa dapat belajar sebaik mungkin sesuai kebutuhannya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya secara optimal. Guru sebagai pendidik tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu dalam mata pelajaran yang diampunya, tetapi berkewajiban juga mendidik dan mengembangkan karakter siswa. Sebagai pendidik, guru harus betul-betul memahami kondisi kelas dan masyarakat di sekitarnya untuk menyadarkan siswa agar dapat memecahkan konflik dan masalah yang timbul dengan cara damai. Sebagai modal untuk dapat menanamkan benih perdamaian di hati siswa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi guru yakni (1) harus pandai mengembangkan dialog dengan siswa, (2) harus menjadi pendengar yang baik bagi siswanya, (3) pandai menangkap pembicaraan dan menanggapi dan (4) dalam berbicara penuh dengan kesabaran, lemah-lembut, tidak emosi dan tidak menyakitkan hati orang lain. Jadi, guru harus memberi teladan cinta damai, berlaku adil dan berperilaku damai di kelas sebelum mengajarkan perdamaian pada siswanya.

RELASI AGAMA DAN PERDAMAIAN

Terjalannya relasi antara perdamaian dan agama, merupakan tema yang selalu menarik untuk dibicarakan mengingat agama hampir selalu terkait (atau dikaitkan) dengan persoalan konflik dan dialog, konfrontasi dan kerja sama, toleransi dan fanatisme, serta perang dan perdamaian. Demikian pula, cita-cita untuk mewujudkan kerukunan beragama hampir selalu menyinggung persoalan agama dan perdamaian, karena kerukunan tidak mungkin diwujudkan dalam

kondisi perang yang disebabkan oleh sentimen apa pun, termasuk sentimen keagamaan.

Agama sebagai sebuah fenomena sosial, tentu tidak akan pernah final dibicarakan dan ditafsirkan; agama selalu hidup dalam sejarah umat manusia dan mengikuti perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu agama mengalami penafsiran ulang yang kadang digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk membela kepentingannya.

Seorang tokoh pemerhati perdamaian agama bernama Murad W Hofmann,¹² berusaha mempertemukan antara agama, dalam hal ini misalnya, Islam dan Kristen, dengan membuka jalan dialog, kerjasama dan alternatif lainnya. Selama ini, kedua agama ini saling menyimpan kecurigaan yang kuat dan tak jarang hingga meletuskan konflik dan konfrontasi yang destruktif bagi tumbuhnya keharmonisan bagi antar pemeluk agama.

Tragedi 11 September 2001 yang lalu, merupakan problem yang ujung-ujungnya sengketa antar agama. Sehingga fenomena terorisme seringkali dikaitkan dengan agama. Gerakan ini muncul di dunia yang telah kehilangan kepastian akibat kemajuan sains dan teknologi sejak tahun 1950-an. Seiring dengan kendala kemiskinan, penyakit, dan kondisi pekerjaan yang tidak manusiawi, ledakan penduduk, penyebaran AIDS, polusi dan krisis energi yang merebak ke permukaan. Semua momok ini membuat manusia ingin kembali bersandar pada penjelasan-penjelasan apokaliptik.¹³

Selain itu, kenyataan pularisme agama dan budaya membuat umat beragama harus menegaskan kembali identitas keagamaan di tengah-tengah umat beragama lain yang juga eksis. Pluralisme keagamaan sudah menjadi kenyataan sejarah yang tidak mungkin bisa dihindari, menafikan pluralisme sama artinya dengan menafikan keberadaan manusia itu sendiri. Namun, pluralisme dan perbedaan (eksoterik) agama sering menjadi sumber konflik dan ketegangan di antara umat beragama. Bahkan umat beragama sebagian besar masih memandang agama lain dalam konteks “superior” dan “inferior”.

Jika agama dipandang “superior” dan “inferior,” maka hubungan-hubungan konfliktual tak bisa dihindarkan. Sebagian besar konflik antar-agama maupun budaya saat ini merupakan akibat penghinaan. Misalnya, banyak dari hal-hal yang terjadi di dunia Islam saat ini, yang secara simplistik dianggap sebagai fundamentalisme, merupakan penegasan terhadap identitas kultural yang

¹² Murad W. Hofmann, *Agar Umat Tak Terlindas Zaman Dialog Antar Peradaban Islam-Kristen*, (Jakarta Serambi, 2006), 28.

¹³ Gilles Kepel, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the Modern World*,

selama ini dianggap inferior. Demikian halnya dengan berbagai konflik yang terjadi di Tanah Air, sebagian (atau mungkin seluruhnya) muncul sebagai akibat penghinaan dan sikap tidak adil yang dipraktikkan sekelompok orang atas kelompok lain yang justru jumlahnya lebih besar.

Selanjutnya menurut Huntington¹⁴ mendefinisikan “peradaban” sebagai pengelompokan terbesar masyarakat yang melampaui tingkat perbedaan manusia dari spesies lainnya. Sebuah peradaban ditentukan oleh anasir-anasir objektif bersama-bahasa, sejarah, agama, adat, dan lembaga-lembaga-juga oleh swa-identifikasi masyarakat. Huntington menyatakan, kini ada tujuh atau delapan peradaban besar di dunia: Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Kristen Ortodoks, Amerika Latin, dan “mungkin” Afrika.

Teori Huntington berusaha menentang skenario “akhir sejarah” pasca-perang dunia mengenai sebuah tatanan internasional berdasarkan penerimaan universal atas model ekonomi kapitalis, tanpa perubahan pada cakrawala sejarah manusia selanjutnya. Arti penting tesis Huntington ini terletak pada faktor-faktor kultural yang bisa dipertimbangkan sebagai perkembangan yang amat positif.

Namun, Huntington seolah melihat peradaban sebagai blok monolitik. Padahal, dalam kenyataan tidak demikian. Sebagian peradaban, misalnya peradaban Islam, terutama ditentukan oleh wahyu keagamaan; yang lain, seperti Konfusius, ditentukan oleh hubungan antara agama yang mengilhami mereka dan kekuasaan politik yang kurang jelas. Dalam peradaban Barat, versi Katolik atau Protestan dari agama Kristen membentuk bagian dari lanskap budaya mereka, meski masyarakat negara-negara Barat amat terbagi berdasar kepercayaan keagamaannya. Dalam setiap peradaban, ada beberapa tren pemikiran yang mengikuti garis-garis pengakuan, dan yang lain mengikuti garis-garis penempatan-subjek perdebatan yang kini hidup di negara-negara seperti Turki dan Italia.

Oleh karena itu, alih-alih dilihat sebagai sebab hubungan konfliktual, perbedaan di antara budaya-budaya dan agama-agama seharusnya bisa menjadi sumber pengalaman untuk saling melengkapi. Budaya-budaya dan agama-agama yang berbeda memiliki instrumen-instrumen intelektual, simbolik, dan eksistensial yang memberi pandangan spesifik tentang realitas personal, historis, dan kosmik, tetapi ia tidak harus menjadi pandangan yang dipaksakan. Tentu saja, saling memperkaya hanya mungkin dilakukan jika kelompok-kelompok

¹⁴ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, (New York of Amerika: Rockefeller, 1996), 68.

yang berbeda mengorganisasi sifat mereka yang terbatas melalui dialog yang konstruktif.

Dialog bukan berarti pengkhianatan; ia berarti pengakuan terhadap sudut pandang lain dan pengalaman lain dalam kejujuran dan koherensi mereka. Ia juga mengimplikasikan integrasi berbagai anasir berharga dari tradisi-tradisi lain, tanpa takut kehilangan identitas. Dalam mencari masa depan manusia yang lebih masuk akal, orang-orang Barat bisa belajar dari budaya-budaya lain mengenai perasaan untuk komunitas, yang bisa menjadi penyeimbang individualisme Barat, atau praktik-praktik ekologis dalam keselarasan bersama alam, yang bisa menyeimbangkan filsafat dominasi Barat.

Satu jaminan perdamaian di antara berbagai budaya dan peradaban adalah perdamaian antar-agama. Seluruh agama besar dunia menyeru pada perdamaian, kasih sayang, keselarasan, simpati, keadilan, kedermawanan, kepedulian, dan kelembutan. Agama-agama seharusnya tidak hanya mengajarkan nirkekerasan dalam komunitas mereka sendiri, tetapi juga mempraktikkan sebuah dialog yang penuh pengertian dan kesantunan dengan agama-agama lain, serta membela kebebasan beragama-legislasi yang menghormati kebebasan hati nurani dari setiap manusia, dan memungkinkan praktik setiap agama dalam teritori historis agama-agama lain. Dan agama-agama seharusnya bisa menyetujui serangkaian kriteria etik universal untuk memberikan basis bagi perdamaian di dunia, dengan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kesepakatan antarbudaya dan politik berdasarkan nirkekerasan dan saling menghormati.

Perjuangan untuk perdamaian, hari demi hari dimenangkan dalam keragaman situasi lokal. Keragaman budaya yang demikian menakutkan Huntington adalah kenyataan hidup di banyak sekolah, lingkungan, dan tempat kerja, dan semuanya bisa dipertimbangkan sebagai persoalan atau sesuatu yang harus dinikmati. Bagi kita, kemenangan kecil dari sebuah dialog, penghormatan, dan kasih sayang untuk “orang lain” adalah benih-benih dari demokrasi multibudaya baru. Memang itu semua masih permulaan, tetapi ia merupakan jalan yang sangat penting menuju perdamaian universal.

TRANSFORMASI PARADIGMA PENDIDIKAN

Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan nasional Indonesia tiba-tiba dikejutkan ketika ada sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII). Yang membuat terkesima adalah proses masuknya mereka ke NII melalui model yang tidak wajar, yaitu sembunyi-sembunyi atau bahkan melalui penculikan. Para orang tua pun kaget

ketika anaknya tiba-tiba mengalami perubahan perilaku, mulai berbohong kepada orang tua hingga melawan orang tua, bahkan dapat menyebut orang tua sebagai kafir.

Di sisi lain, sebuah penelitian yang menjadikan guru agama dan murid sebagai respondennya menghasilkan kesimpulan bahwa 49 persen siswa setuju aksi radikal berlabel agama. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian tersebut dilakukan di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri dengan melibatkan 993 siswa dan 590 guru. Tak satu pun madrasah diambil jadi sampel.¹⁵

Fakta dan data di atas membuat mereka yang selama ini tidak peduli terhadap praksis pendidikan nasional menjadi terperangah, seakan-akan dunia pendidikan nasional kiamat. Tapi, bagi penulis, keduanya itu hanya menjadi legitimator atas keresahan penulis selama ini mengenai hilangnya roh pendidikan nasional, terutama sejak praksis pendidikan nasional terjebak pada formalisasi agama.

Kecenderungan formalisasi agama praksis pendidikan nasional dimulai awal dekade 1990-an, dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) yang dalam penjelasan pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa, "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan".¹⁶ Secara logika hak asasi manusia, penjelasan tersebut betul, tapi implementasinya di lapangan adalah memaksa sekolah-sekolah berlabel agama pun harus menyediakan guru agama yang berbeda dengan misi agamanya. Karena penyelenggara pendidikan yang berlabel agama tidak mau repot-repot, mereka pun membatasi penerimaan murid yang agamanya berbeda dengan misi agama yang diembannya. Atau kalau tidak, ada surat pernyataan "bersedia mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dikembangkan oleh sekolah tersebut".

Pada 1994, muncul kebijakan baru yang mengizinkan foto dalam ijazah perempuan boleh tertutup telinganya. Implikasinya adalah pakaian jilbab boleh dipakai secara resmi sebagai bentuk seragam sekolah. Sebelumnya, ada aturan bahwa foto perempuan dalam ijazah harus tampak telinganya. Konsekuensinya adalah model pakaian jilbab tidak diterima sebagai pakaian seragam resmi sekolah.

¹⁵ <http://www.tempo.org/> darmangtyas 26 April 2012

¹⁶ Ibid,

Adanya kebijakan baru yang memperbolehkan pakaian jilbab sebagai pakaian seragam resmi itu sebetulnya merupakan titik awal dari formalisasi agama di sekolah. Bersamaan dengan itu, proses pembinaan agama di sekolah pun lebih intensif melalui organisasi siswa yang tergabung dalam kelompok pembimbingan rohani. Kelak, berdasarkan hasil penelitian Rahima, kelompok-kelompok rohani di beberapa sekolah yang dibimbing oleh orang bukan dari guru tapi oleh alumni atau senior itulah yang melahirkan masalah di beberapa sekolah, sehingga dalam sejumlah kesempatan diusulkan untuk dibubarkan.

Buah reformasi Reformasi politik yang ditandai dengan turunnya pemimpin Orde Baru, Soeharto, dari kursi presiden setelah berkuasa 32 tahun berdampak luas terhadap formalisasi agama di sekolah. Sebab, bersamaan dengan itu iklim demokrasi terbuka lebar, sehingga siapa pun dapat menyalurkan aspirasinya. Mereka yang sudah lama menghendaki adanya formalisasi agama di sekolah semakin terbuka lebar kesempatannya.

Formalisasi agama di sekolah dimulai secara resmi dengan munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Juwono Sudarsono) dan Menteri Agama (A. Malik Fadjar) Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999,¹⁷ yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Indra Jati Sidi) yang mengatur tentang kewajiban siswa mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa. SKB tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dijadikan sebagai pilot project untuk pelaksanaannya, sempat menimbulkan ketegangan antarsekolah dan antarpengelola sekolah swasta, khususnya non-Islam dengan Kakanwil Pendidikan dan Kebudayaan DIY serta aparat birokrasinya.

Formalisasi agama tersebut makin diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) sebagai pengganti terhadap UU SPN Tahun 1989. Butir (a) ayat (1) Pasal 12 UU Nomor 20/2003 secara tegas menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pen didik yang seagama”. Bunyi pasal ini sekadar menegaskan bunyi penjelasan ayat (2) Pasal 28 UU SPN Nomor 2/1989 di atas.¹⁸

Dengan ditarik menjadi pasal tersendiri, kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar menjadi penjelasan. Implikasi dari bunyi pasal 12

¹⁷ Ibid,

¹⁸ http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2011/05/02/INDEX.SHTML?ArtId=012_010&Search=Y

di atas adalah menjadikan sekolah-sekolah swasta berbasis agama menjadi lebih eksklusif dalam penerimaan murid baru, padahal mereka sebelumnya sangat inklusif. Eksklusivitas dalam penerimaan murid baru itu berpengaruh terhadap relasi sosial yang dibangun oleh murid di sekolah, karena mereka kemudian hanya bergaul dengan orang-orang yang seagama, semula di sekolah yang sama, mereka bisa bergaul secara inklusif. Akhirnya, sekolah sebagai institusi pendidikan yang seharusnya inklusif terhadap semua orang justru mengembangkan eksklusivitas, karena regulasinya memang menghendaki hal itu.

Celakanya, sekolah-sekolah negeri yang sebelumnya menjadi pilihan pertama bagi setiap orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dengan tanpa mengalami hambatan agama maupun ekonomi justru semakin eksklusif. Banyak sekolah negeri kita yang jauh lebih agamis daripada sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama.

Bibit-bibit radikalisme yang ditemukan dalam penelitian Rahima itu justru terjadi di sekolah-sekolah negeri favorit. Kepala sekolah tahu persoalan hal itu. Tapi, karena para aktivis dalam organisasi itu berlaku lebih sopan dan rajin, mereka sulit untuk menindaknya. Tapi berdasarkan fenomena terakhir, ketika para siswa setuju terhadap sikap radikal yang berlabel agama atau bahkan banyak mahasiswa yang menjadi anggota NII, saatnya roh pendidikan nasional dikembalikan ke jiwa nasionalnya seperti yang diamanatkan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan nasional.

Gagasan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh untuk mengembalikan kenasionalan pendidikan nasional dengan dimulai melalui upacara bendera pada setiap Senin perlu diapresiasi. Hanya, menurut penulis, masalahnya bukan di sana, melainkan pada formalisasi agama yang terlalu kuat, dimulai dari salam perjumpaan, cara berdoa, dan sejenisnya. Sampai akhir 1990-an, ucapan perjumpaan guru di kelas adalah “selamat pagi/siang/sore” dan bila berdoa “menurut keyakinan kita masing-masing”.

Tapi sekarang semuanya sudah berganti dengan ungkapan keagamaan mayoritas yang berkembang di setiap daerah. Demikian pula saat berdoa menurut agama mayoritas, padahal orang di kelas itu belum tentu beragama sama. Akibatnya, mereka yang menjadi minoritas di sekolah tersebut merasa tereksklusikan. Perasaan tereksklusikan itu jelas kurang elok untuk menjadi dasar penumbuhan jiwa kenasionalan. Agar kenasionalan muncul dari sistem pendidikan nasional, roh nasional dalam pendidikan kita itu harus dikembalikan lagi. Tanpa mengembalikan roh nasional, sulit mengharapkan pendidikan nasional melahirkan orang-orang yang berjiwa inklusif.

PENUTUP

Peran pendidikan Keagamaan dalam mewujudkan budaya perdamaian sangat besar dan sudah terbukti. Ada empat faktor yang bisa menentukan keberhasilan peran pendidikan agama dalam membangun kehidupan yang damai, yaitu; pertama adanya peran tokoh agama/ kyai, yang kedua terciptanya rasa keadilan, yang ketiga dengan keadilan dapat menciptakan budaya perdamaian, yang keempat adalah peran dari lembaga pendidikan yang berbasis agama. Baik di kota maupun di desa.

Bahaya homogenisasi pendidikan tampak nyata dalam lingkungan lembaga pendidikan. Banyak sekolah bermunculan menawarkan keragaman. Sekolah homogen hanya akan menciptakan siswa dengan satu pandangan yang sama, menjadikan munculnya realitas semu dalam lingkungan sekolah yang berkebalikan dengan realitas nyata di masyarakat yang cenderung heterogen. Homogenisasi pendidikan akan memunculkan konflik dalam jangka panjang, membentuk kelompok eksklusif yang pada akhirnya akan menciptakan diskriminasi dan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan akan menguatkan dikotomi mayoritas-minoritas, kaya-miskin, pintar-bodoh.

Sekolah eksklusif (homogen) seharusnya tidak diperkenankan karena sebagian besar hanya dapat dijangkau kalangan tertentu saja. Pendidikan semacam itu dianggap berbahaya karena tidak membiasakan siswa yang nantinya harus bisa menghadapi lingkungan dengan tantangan yang beragam. Sekolah seharusnya bisa berperan untuk menjembatani siswa ke jenjang berikutnya hingga akhirnya terjun ke masyarakat. Ketika pendidikan eksklusif telah diterapkan sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), misalnya, kemudian berlanjut ke sekolah dasar (SD) yang eksklusif pula, maka justru akan merugikan siswa itu sendiri, karena siswa tidak pernah tahu lingkungan sosial yang sebenarnya.

Untuk mengatasi dan mengurangi homogenisasi pendidikan perlu kiranya untuk menyuarakan kembali pendidikan untuk semua tanpa melihat latar belakang, memunculkan pendidikan inklusif yang berbasis pada pluralisme dengan menciptakan lingkungan sekolah yang nyata sesuai dengan keadaan lingkungan yang heterogen. Dengan kata lain menciptakan kesadaran akan dunia yang beragam tidak hanya dengan mengajarkan materi seperti multikultural saja, tetapi menciptakan kesadaran akan dunianya melalui keberagaman yang nyata melalui lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Faisal, Yusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Andang, Al, *Agama Yang Berpijak dan Berpihak*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Bappenas, *Model Terpadu Perencanaan Sumber Daya Manusia Nasional*, Jakarta: Bappenas, 1992.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Effendi, Tadjuddin. N., *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- _____, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Freeman and Thomas, "Consumerism in Education: A Comparison between Canada and United Kingdom," *International Journal of Educational Management*, Vol. 19 No. 2, 2005,
- Freire and Faundez, *Belajar Bertanya, Pendidikan yang Membebaskan*, Jakarta: BPK Gunung, 1995.
- Kepel, Gilles, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the Modern World*, 1994.
- Johnson and Stewart, "Education, Ethnicity and Conflict," *International Journal of Educational Development*, No 27, 2007.
- Murad W. Hofmann, *Agar Umat Tak Terlindas Zaman Dialog Antarperadaban Islam Kristen*, Jakarta: Serambi 2006.
- Rois Mahfud, *Al Islam: Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Airlangga, 2011.
- Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, New York of Amerika: Rockefeller, 1996.
- Thamarajakshi, R., *Human Resource Development in Asian Countries An Integrated Approach*, New Delhi: ARTEP, 1998.
- Wahid, Abdurrahman, *On The expansion of Transasional Islamic Fundamentalism in Indonesia*, Jakarta; Wahid Institut, 2009.
- [http.www.tempo.org/](http://www.tempo.org/) darmangtyas 26 April 2011
- http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2011/05/02/INDEX.SHTML?ArtId=012_010&Search=Y